



**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLILNDUNGAN ANAK  
KABUPATEN SUKABUMI**

# **LAPORAN KINERJA TAHUN 2019**

Jalan Siliwangi Nomor 65 Telepon : (0266) 227440 Fax : (0266) 227440  
Email : [DP3AKABSI@gmail.com](mailto:DP3AKABSI@gmail.com) Sukabumi - 43113



## **KATA PENGANTAR**

Puji dan Syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahuwataala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukabumi dapat menyusun Laporan Kinerja (LKJ) Tahun 2019 sebagai pertanggungjawaban implementasi dari Rencana Strategis tahun 2016 – 2021 dan rencana kerja tahun 2019.

Laporan Kinerja (LKJ) merupakan Akhir dari serangkaian perencanaan kinerja, pengukuran, evaluasi dan analisis capaian kinerja Dinas Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukabumi selama tahun 2019. Penyusunan Laporan Kinerja ini sesuai surat Kepala Lembaga Administrasi atau dari lima komponen dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang berlaku dan diwajibkan kepada seluruh instansi pemerintah secara nasional baik untuk Pemerintah Pusat (Kementerian dan Lembaga) maupun Pemerintah Daerah.

Mudah-mudahan Laporan Kinerja (LKJ) ini dapat memberikan manfaat dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sukabumi, 31 Desember 2019

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan  
Dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukabumi,



**Hj. AISAH, SE., Ak., M.Sc.**  
NIP. 196602131990032005



## **DAFTAR ISI**

<b>Kata Pengantar</b> .....	i
<b>Daftar Isi</b> .....	ii
<b>Daftar Tabel</b> .....	iii
<b>Daftar Grafik</b> .....	iv
<b>Bab I Pendahuluan</b>	
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Maksud dan Tujuan .....	3
1.3. Tugas Pokok dan Fungsi .....	4
1.4. Landasan Hukum .....	6
<b>Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja</b>	
2.1. Rencana Strategis Tahun 2016-2021 .....	8
2.2. Perjanjian Kinerja .....	12
2.3. Rencana Anggaran Tahun 2019 .....	13
<b>Bab III Akuntabilitas Kinerja</b>	
3.1. Capaian Kinerja Organisasi .....	19
3.2. Realisasi Anggaran .....	29
<b>Bab IV Penutup</b>	
4.1. Kesimpulan .....	31
4.2. Rencana Tindak Lanjut .....	33
<b>Lampiran-lampiran</b>	



**DAFTAR TABEL**

Tabel 2.1.	Sasaran Strategis Jangka Menengah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak .....	11
Tabel 2.2.	Perjanjian Kerja Tahun 2019 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak .....	12
Tabel 2.3.	Rencana Kerja dan Anggaran Tahun Anggaran 2018 .....	14
Tabel 2.4.	Misi, Tujuan, Sasaran dan Program Kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2019 .....	15
Tabel 2.5.	Anggaran Belanja Langsung Per Sasaran Strategis .....	17
Tabel 3.1.	Tabel Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2019 .....	21
Tabel 3.2.	Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	25
Tabel 3.3.	Analisis Program / Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja .....	27
Tabel 3.4.	Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2019 .....	29



## **DAFTAR GRAFIK**

Grafik 3.1. Perbandingan Realisasi Kinerja Per Indikator Tahun 2018 dengan Tahun 2019 .....	22
Grafik 3.2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2018-2019 Persentase Penanganan Kasus Korban Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan .....	23
Grafik 3.3. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2018-2019 Persentase Perempuan dalam lembaga Organisasi .....	24
Grafik 3.4. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2018-2019 Persentase Penanganan Kasus Korban Tindak Kekerasan terhadap Anak .....	24
Grafik 3.5. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2018-2019 Persentase Kabupaten Layak Anak .....	25
Grafik 3.6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya .....	26
Grafik 3.7. Analisis Program / Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja .....	28
Grafik 3.8. Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2019 .....	30



## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Isu dan permasalahan perempuan dan anak bersifat kompleks dan lintas sektoral. Dikatakan kompleks karena banyaknya faktor yang saling terkait sebagai penyebab rendahnya kualitas hidup perempuan dan anak. Sementara disebut isu lintas sektoral karena permasalahannya terdapat di hampir semua sektor, dan karenanya, penanganan permasalahan tersebut harus melibatkan seluruh sektor pembangunan.

Menyadari hal tersebut, keberadaan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang dibentuk berdasarkan Permen PPPA Nomor 8 tahun 2016 tentang Penetapan Hasil Pemetaan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Permen PPPA Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di tindak lanjuti oleh Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sukabumi serta Peraturan Bupati Nomor 67 tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan lembaga pemerintah yang diberi amanat dan tugas serta tanggung jawab dalam menangani pembangunan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak yang mengacu pada visi, misi Kabupaten Sukabumi, tujuan dan sasaran sebagai panduan untuk menangani isu dan permasalahan kesenjangan gender, perempuan dan anak.

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten



Sukabumi dan Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukabumi, maka kedudukan Dinas ini adalah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang melaksanakan urusan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan tersebut di atas sesuai dengan fungsi dan tugas pokok, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukabumi pada Tahun 2018 melaksanakan 2 (Dua) Urusan Wajib yaitu Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Urusan Perlindungan Anak serta melaksanakan 8 (Delapan) Program Prioritas Program Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Perempuan.

Salah satu tuntutan publik pada saat ini adalah adanya transparansi dan akuntabilitas melaksanakan program kegiatan serta pengelolaan keuangan sekaligus kinerja pemerintahan daerah, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara bersih, bertanggungjawab dan memberikan dampak (*impact*) serta manfaat (*benefit*) dari hasil (*outcome*) yang diperoleh.

Ukuran keberhasilan kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dilihat dari sejauhmana sasaran-sasaran tersebut tercapai. Untuk melihat sejauh mana sasaran-sasaran tersebut tercapai, perlu dilakukan evaluasi terhadap hasil pencapaian tersebut, yang dituangkan ke dalam suatu laporan yang disebut Laporan Kinerja (LKJ). Dengan dasar tersebut, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) berdiri sebagai bagian Reformasi Birokrasi untuk melaksanakan seluruh proses pemerintahan dalam rangka merealisasikan



keinginan bersama untuk mewujudkan *Good Governance*. SAKIP menuntut adanya sinergitas antara proses Perencanaan, Pengukuran, Pelaporan sampai Evaluasi dan pemanfaatan informasi kinerja.

Pada kondisi terkini, evaluasi terhadap SAKIP merupakan isu paling strategis dalam SAKIP karena pada akhir prosesnya akan dapat mencerminkan optimal atau tidaknya kinerja dari tiap-tiap lembaga/ instansi pemerintah. Sebab hal ini dapat memperlihatkan sejauh mana kemajuan instansi pemerintah dalam menerapkan manajemen kinerja yang berfokus pada hasil; pembangunan sistem, pengukuran, pengumpulan data kinerja dan pelaporan kinerja; perkembangan proses monitoring dan evaluasi pelaksanaan program; serta perkembangan pelaksanaan kemajuan tingkat akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

## **1.2. Maksud dan Tujuan**

### **1.2.1.Maksud**

- a. Sebagai acuan dalam melakukan pengukuran kinerja Perangkat Daerah dalam kurun waktu satu tahun;
- b. Sebagai perbandingan antara realisasi anggaran dengan realisasi kinerja Perangkat Daerah.

### **1.2.2.Tujuan**

- a. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
- b. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak untuk meningkatkan kinerjanya.



- c. Terwujudnya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan;
- d. Memudahkan dalam melaksanakan evaluasi sasaran kinerja Perangkat Daerah sebagai acuan untuk pencapaian kinerja Perangkat Daerah selanjutnya.

### **1.3. Tugas Pokok dan Fungsi**

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah kabupaten Sukabumi dan Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 67 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukabumi, bahwa Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukabumi Melaksanakan urusan pemerintah daerah dan tugas pembantuan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Adapun Susunan Organisasi pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukabumi, yaitu :

- 1) Kepala Dinas
- 2) Sekretariat, membawahkan :
  - Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
  - Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi;
- 3) Bidang Peningkatan Kualitas Hidup, Perlindungan dan Pemberdayaan Hak Perempuan, Membawahkan:
  - Seksi Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan, dan
  - Seksi Perlindungan dan Pemberdayaan Hak Perempuan



- 4) Bidang Kesetaraan Gender, Informasi, Kerjasama Partisipasi Masyarakat, membawahkan:
  - Seksi Kesetaraan Gender, dan
  - Seksi Informasi, Kerjasama Partisipasi Masyarakat
- 5) Bidang Perlindungan dan Tumbuh Kembang Anak, membawahkan:
  - Seksi Perlindungan Anak, dan
  - Seksi Tumbuh Kembang Anak
- 6) UPTD, dan
- 7) Kelompok Jabatan Fungsional

### **1.3.1. Tugas Pokok**

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukabumi mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang melaksanakan urusan pemerintah daerah dan tugas pembantuan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

### **1.3.2. Fungsi**

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, maka Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukabumi mempunyai fungsi sebagai berikut:

- 1) penyusunan Kebijakan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- 2) perumusan dan penyusunan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- 3) pelaksanaan kebijakan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;



- 4) pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang kesekretariatan; peningkatan kualitas hidup, perlindungan dan pemberdayaan hak perempuan; kesetaraan gender, informasi, kerjasama dan partisipasi masyarakat; perlindungan dan tumbuh kembang anak; kelompok jabatan fungsional dan unit organisasi lainnya di lingkungan Dinas;
- 5) pelaksanaan administrasi dinas di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- 6) pembinaan penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan dinas;
- 7) penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- 8) pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;
- 9) pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas; dan
- 10) pelaporan hasil pelaksanaan tugas;
- 11) penyelenggaraan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

#### **1.4. Landasan Hukum**

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukabumi Tahun 2018 mengacu pada:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
2. Undang-undang No. 28 tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;



3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2016-2021;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah kabupaten Sukabumi;
7. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 67 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
8. Peraturan Bupati No. 64 Tahun 2017 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Laporan Kinerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukabumi.



## **BAB II**

### **PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

#### **2.1. Rencana Strategis Tahun 2016-2021**

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukabumi Tahun 2016 - 2021 mencakup Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang ingin dicapai selama kurun waktu sampai dengan 5(lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada. Strategi/cara mencapai tujuan dan sasaran yang terdiri dari kebijakan-kebijakan tersebut diimplementasikan dalam rencana kerja tahun 2018.

Adapun komponen rencana strategis tersebut mengacu kepada visi kabupaten sukabumi, yaitu :

#### **Visi**

*“Terwujudnya Kabupaten Sukabumi yang Religius dan Mandiri”*,

#### **Misi**

Untuk mewujudkan visi tersebut, dituangkan dalam misi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukabumi yang terkait dengan misi kedua kabupaten sukabumi, yaitu :

*“ Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berdaya saing dan religius”*



Sasaran Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah Peningkatan Partisipasi, Pemberdayaan Perempuan dan Pengembangan Hak-hak Anak. Dan untuk mendukung sasaran strategis tersebut, telah dibentuk satu program yaitu Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang dijabarkan dalam bentuk kegiatan-kegiatan, antara lain :

1. Bimbingan Bagi Kelompok Binaan Sosial Perempuan Kepala Keluarga;
2. Pemberdayaan dan Pembinaan Perempuan;
3. Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Perencanaan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG);
4. Pembinaan Lembaga dan Organisasi Perempuan;
5. Pengembangan Hak Anak;
6. Upaya Perlindungan dan Penanganan Korban Kejahatan Seksual Terhadap Perempuan dan Anak;
7. Penanganan WNI-Migran, Korban Perdagangan Orang dan Korban Tindak Kekerasan;
8. Pengembangan Program Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A);
9. Pembuatan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan;
10. Integrasi Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (Bantuan Provinsi Tahun 2019).



### **Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah**

Penetapan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukabumi didasarkan pada faktor-faktor kunci keberhasilan yang dilakukan setelah penetapan Visi dan Misi. Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan Misi, dengan hasil akhir yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5(lima) tahun.

Tujuan Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukabumi di rumuskan sebagai representasi visi dan misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Sukabumi yang menunjukkan arah strategis dengan menfokuskan arah kebijakan semua program dan kegiatan yang dilaksanakan setiap tahun.

Tujuan tersebut yaitu Peningkatan Partisipasi, Pemberdayaan Perempuan dan Pengembangan Hak-hak Anak. Sedangkan sasaran jangka menengahnya yaitu Meningkatkan Partisipasi peran lembaga dan organisasi perempuan dalam pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak. Adapun, keterkaitan tujuan dan sasaran yang dirumuskan dalam mendukung Visi dan Misi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah sebagaimana yang tertuang dalam Tabel dibawah ini :



**Tabel 2.1. Sasaran Strategis Jangka Menengah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Target					Kodisi Akhir Tahun 2019
					2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Peningkatan Partisipasi, Pemberdayaan Perempuan dan Pengembangan Hak-hak Anak	Peningkatan Partisipasi, Pemberdayaan Perempuan dan Pengembangan Hak-hak Anak	Persentase Penanganan Kasus Korban Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Peningkatan Partisipasi, Pemberdayaan Perempuan dan Pengembangan Hak-hak Anak	Persentase Partisipasi Perempuan dalam kelembagaan	%	5,33	5,33	6,95	6,95	6,95	6,95
		Peningkatan Partisipasi, Pemberdayaan Perempuan dan Pengembangan Hak-hak Anak	Persentase Penanganan Kasus Korban Tindak Kekerasan Terhadap Anak	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Peningkatan Partisipasi, Pemberdayaan Perempuan dan Pengembangan Hak-hak Anak	Persentase Kecamatan Layak Anak	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%



## 2.2. Perjanjian Kinerja

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil dan mewujudkan target kinerja maka Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukabumi menyusun perjanjian kinerja seperti berikut ini :

**Tabel 2.2. Perjanjian Kerja Tahun 2019  
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Partisipasi, Pemberdayaan Perempuan dan Pengembangan Hak - hak Anak	Persentase Penanganan Kasus Korban Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan	100%
		Persentase Partisipasi Perempuan dalam kelembagaan	6,95%
		Persentase Penanganan Kasus Korban Tindak Kekerasan Terhadap Anak	100%
		Persentase Kecamatan Layak Anak	100%

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Perempuan	Rp. 3.145.000.000,00	APBD II



Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukabumi pada Tahun Anggaran 2019 memiliki sasaran strategis yaitu Peningkatan Partisipasi, Pemberdayaan Perempuan dan Pengembangan Hak-hak Anak. Sasaran strategis tersebut memiliki empat Indikator Kinerja Utama, yaitu :

- a. Persentase Penanganan Kasus Korban Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dengan target 100%
- b. Persentase Partisipasi Perempuan dalam kelembagaan dengan target 6,95%
- c. Persentase Penanganan Kasus Korban Tindak Kekerasan Terhadap Anak dengan target 100%
- d. Persentase Kecamatan Layak Anak dengan target 100%

Pada tahun 2019, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukabumi memiliki Program Prioritas yang mendukung Keempat Indikator Kinerja Utama tersebut.

### **2.3. Rencana Anggaran Tahun 2019**

Program kegiatan dan Anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai program prioritas yang di jabarkan dalam bentuk kegiatan yaitu :



**Tabel 2.3. Rencana Kerja dan Anggaran Tahun Anggaran 2018**

No	Program	Kegiatan	Usulan (Rp.)
1	Program Pemberdayaan, Perlindungan anak dan Perempuan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Bimbingan Bagi Kelompok Binaan Sosial Perempuan Kepala Keluarga;</li><li>2. Pemberdayaan dan Pembinaan Perempuan;</li><li>3. Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Perencanaan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG);</li><li>4. Pembinaan Lembaga dan Organisasi Perempuan;</li><li>5. Pengembangan Hak Anak;</li><li>6. Upaya Perlindungan dan Penanganan Korban Kejahatan Seksual Terhadap Perempuan dan Anak;</li><li>7. Penanganan WNI-Migran, Korban Perdagangan Orang dan Korban Tindak Kekerasan;</li><li>8. Pengembangan Program Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A);</li><li>9. Pembuatan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan;</li><li>10. Integrasi Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (Bantuan Provinsi Tahun 2019)</li></ol>	<p>295.000.000 236.000.000 513.639.000 868.000.000 500.000.000 771.000.000 245.716.000 499.000.000 - 300.000.000</p>
Jumlah .....			4.228.355.000



**Tabel 2.4. Misi, Tujuan, Sasaran dan Program Kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2019**

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun 2019		Anggaran
			Program	Kegiatan	
Meningkatkan Perlindungan Terhadap anak dan Perempuan	Peningkatan partisipasi, Pemberdayaan Perempuan dan pengembangan Hak-hak Anak	Persentase Penanganan Kasus Korban Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan	Program Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Perempuan	Penanganan WNI-Migran, Korban Perdagangan Orang dan Korban Tindak Kekerasan	245.716.000
		Persentase Partisipasi Perempuan dalam kelembagaan	Program Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Perempuan	Bimbingan Bagi Kelompok Binaan Sosial Perempuan Kepala Keluarga	295.000.000
	Program Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Perempuan		Pemberdayaan dan Pembinaan Perempuan	236.000.000	
	Program Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Perempuan		Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Perencanaan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG)	513.639.000	
	Program Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Perempuan		Pembinaan Lembaga dan Organisasi Perempuan	868.000.000	
	Program Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Perempuan		Integrasi Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (Bantuan Provinsi Tahun 2019).	300.000.000	



**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
KABUPATEN SUKABUMI**

		Persentase Penanganan Kasus Korban Tindak Kekerasan Terhadap Anak	Program Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Perempuan	Upaya Perlindungan dan Penanganan Korban Kejahatan Seksual Terhadap Perempuan dan Anak	771.000.000
			Program Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Perempuan	Pengembangan Program Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)	499.000.000
		Persentase Kecamatan Layak Anak	Program Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Perempuan	Pengembangan Hak Anak	500.000.000
Jumlah .....					4.228.355.000



**Tabel 2.5. Anggaran Belanja Langsung Per Sasaran Strategis**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Anggaran	Realisasi Anggaran	%
(1)	(2)	(3)	(4)		
1	Meningkatnya Partisipasi, Pemberdayaan Perempuan dan Pengembangan Hak - hak Anak	Persentase Penanganan Kasus Korban Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan	245.716.000	244.166.000	99,37 %
		Persentase Partisipasi Perempuan dalam kelembagaan	2.212.639.000	2.146.458.650	97,01 %
		Persentase Penanganan Kasus Korban Tindak Kekerasan Terhadap Anak	1.270.000.000	1.255.871.838	98,89 %
		Persentase Kecamatan Layak Anak	500.000.000	492.960.000	98,59%

Dalam upaya memenuhi sasaran strategis, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukabumi memiliki 4 indikator kinerja dimana keempat Indikator Kinerja tersebut dijabarkan melalui kegiatan kegiatan antara lain :

- a. Persentase Penanganan Kasus Korban Tindak kekerasan Terhadap Perempuan
  - a. Penanganan WNI-Migran, Korban Perdagangan Orang dan Korban Tindak Kekerasan
  - b. Pembuatan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan



- b. Persentase Partisipasi Perempuan dalam kelembagaan
  - a. Bimbingan Bagi Kelompok Binaan Sosial Perempuan Kepala Keluarga
  - b. Pemberdayaan dan Pembinaan Perempuan
  - c. Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Perencanaan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG)
  - d. Pembinaan Lembaga dan Organisasi Perempuan
- c. Persentase Penanganan Kasus Korban Tindak Kekerasan Terhadap Anak
  - a. Upaya Perlindungan dan Penanganan Korban Kejahatan Seksual Terhadap Perempuan dan Anak
  - b. Pengembangan Program Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)
- d. Persentase Kecamatan Layak Anak
  - a. Pengembangan Hak Anak
  - b. Integrasi Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (Bantuan Provinsi Tahun 2019).



### **BAB III**

## **AKUNTABILITAS KINERJA**

### **3.1. Capaian Kinerja Organisasi**

Laporan Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban dari instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Dalam melaksanakan penyusunan laporan kinerja perlu adanya pengukuran kinerja serta evaluasi secara memadai. Dalam hal ini pengukuran kinerja pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukabumi tertuang pada 4(empat) Indikator Kinerja Utama (IKU), antara lain :

1. Persentase Penanganan Kasus Korban Tindak kekerasan Terhadap Perempuan
2. Persentase Partisipasi Perempuan dalam Kelembagaan
3. Persentase Penanganan Kasus Korban Tindak Kekerasan Terhadap Anak
4. Persentase Kecamatan Layak Anak

Pengukuran kinerja ini berisi penyajian capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi yang sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi untuk menunjang Indikator Kinerja Utama (IKU) DP3A Kabupaten Sukabumi, Pengukuran Kinerja tahun 2019 dapat dijelaskan melalui kegiatan sebagai berikut :

- a. Persentase Penanganan Kasus Korban Tindak kekerasan Terhadap Perempuan



- ✓ Penanganan WNI-Migran, Korban Perdagangan Orang dan Korban Tindak Kekerasan
  - ✓ Pembuatan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan
- b. Persentase Partisipasi Perempuan dalam kelembagaan
- ✓ Bimbingan Bagi Kelompok Binaan Sosial Perempuan Kepala Keluarga
  - ✓ Pemberdayaan dan Pembinaan Perempuan
  - ✓ Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Perencanaan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG)
  - ✓ Pembinaan Lembaga dan Organisasi Perempuan
- c. Persentase Penanganan Kasus Korban Tindak Kekerasan Terhadap Anak
- ✓ Upaya Perlindungan dan Penanganan Korban Kejahatan Seksual Terhadap Perempuan dan Anak
  - ✓ Pengembangan Program Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)
- d. Persentase Kecamatan Layak Anak
- ✓ Pengembangan Hak Anak
  - ✓ Integrasi Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (Bantuan Provinsi Tahun 2019).

Adapun hasil dari pengukuran indikator kinerja Utama DP3A pada tahun 2019 dapat di lihat pada tabel di bawah ini :



**Tabel 3.1. Tabel Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2019**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Indikator Kinerja Tahun 2019		Capaian
				Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(4)	(4)	(4)
1	Meningkatnya Partisipasi, Pemberdayaan Perempuan dan Pengembangan Hak - hak Anak	Persentase Penanganan Kasus Korban Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan	%	48 orang	48 orang	100%
		Persentase Partisipasi Perempuan dalam kelembagaan	%	6,95%	6,95%	100%
		Persentase Penanganan Kasus Korban Tindak Kekerasan Terhadap Anak	%	101 orang	101 orang	100%
		Persentase Kecamatan Layak Anak	%	12 Kecamatan	12 Kecamatan	100%

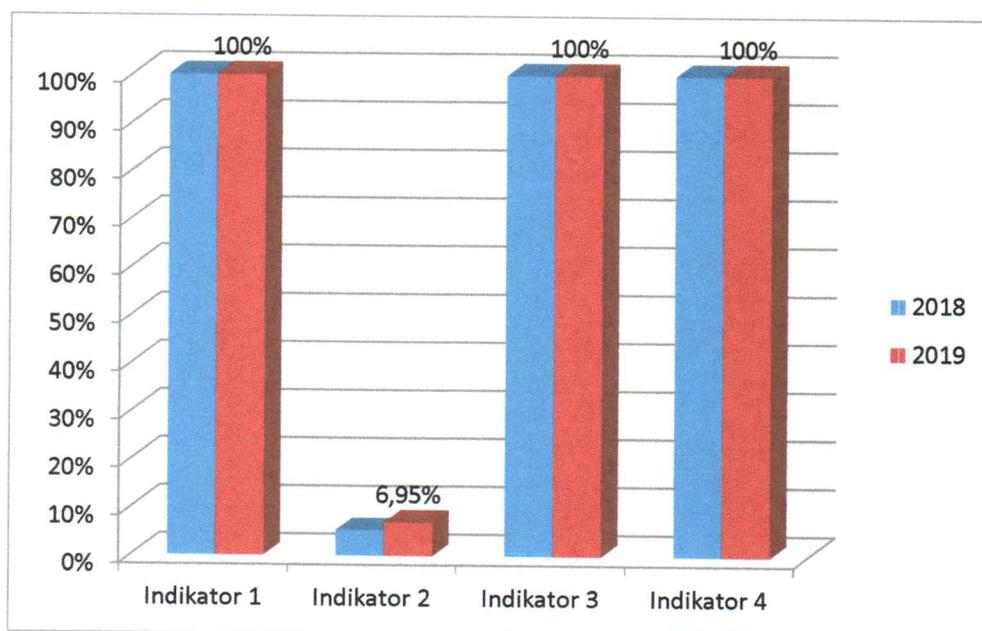
Pada Tabel 3.1. kita dapat melihat target dari masing masing Indikator Kinerja. Adapun untuk menunjang sasaran strategis tersebut, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memiliki beberapa kegiatan yang menunjang. Antara lain:

- a. Persentase Penanganan Kasus Korban Tindak kekerasan Terhadap Perempuan
  - ✓ Penanganan WNI-Migran, Korban Perdagangan Orang dan Korban Tindak Kekerasan
  - ✓ Pembuatan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan



- b. Persentase Partisipasi Perempuan dalam kelembagaan
  - ✓ Bimbingan Bagi Kelompok Binaan Sosial Perempuan Kepala Keluarga
  - ✓ Pemberdayaan dan Pembinaan Perempuan
  - ✓ Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Perencanaan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG)
  - ✓ Pembinaan Lembaga dan Organisasi Perempuan
- c. Persentase Penanganan Kasus Korban Tindak Kekerasan Terhadap Anak
  - ✓ Upaya Perlindungan dan Penanganan Korban Kejahatan Seksual Terhadap Perempuan dan Anak
  - ✓ Pengembangan Program Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)
- d. Persentase Kecamatan Layak Anak
  - ✓ Pengembangan Hak Anak
  - ✓ Integrasi Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (Bantuan Provinsi Tahun 2019).

**Grafik 3.1. Perbandingan Realisasi Kinerja Per Indikator Tahun 2018 dengan Tahun 2019**





Keterangan :

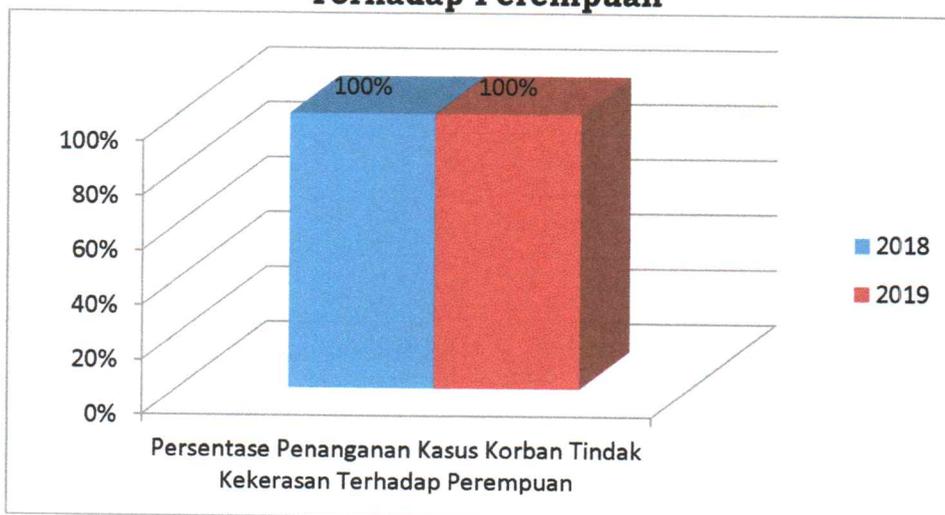
- Indikator 1 : Persentase Penanganan Kasus Korban Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan
- Indikator 2 : Persentase Partisipasi Perempuan Dalam Lembaga Organisasi
- Indikator 3 : Persentase Penanganan Kasus Korban Tindak Kekerasan Terhadap Anak
- Indikator 4 : Persentase Kecamatan Layak Anak

Pada Tabel 3.1. di atas kita dapat melihat perbandingan dari realisasi kinerja tahun 2018 dan 2019. Dimana untuk indikator Persentase Penanganan Kasus Korban Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan, pada tahun 2018 realisasinya mencapai 100% begitu juga pada tahun 2019.

Untuk Indikator Persentase Partisipasi Perempuan Dalam Lembaga Organisasi realisasi kinerjanya pada tahun 2018 mencapai 5,33% dan 2019 mencapai 6,95%. Hal tersebut sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan.

Untuk indikator Persentase Penanganan Kasus Korban Tindak Kekerasan Terhadap Anak realisasi kinerja tahun 2018 dan tahun 2019 sama sama mencapai 100%. Begitu juga untuk indikator Persentase Kecamatan Layak Anak dimana realisasi kinerja tahun 2018 dan 2019 sama sama mencapai 100%.

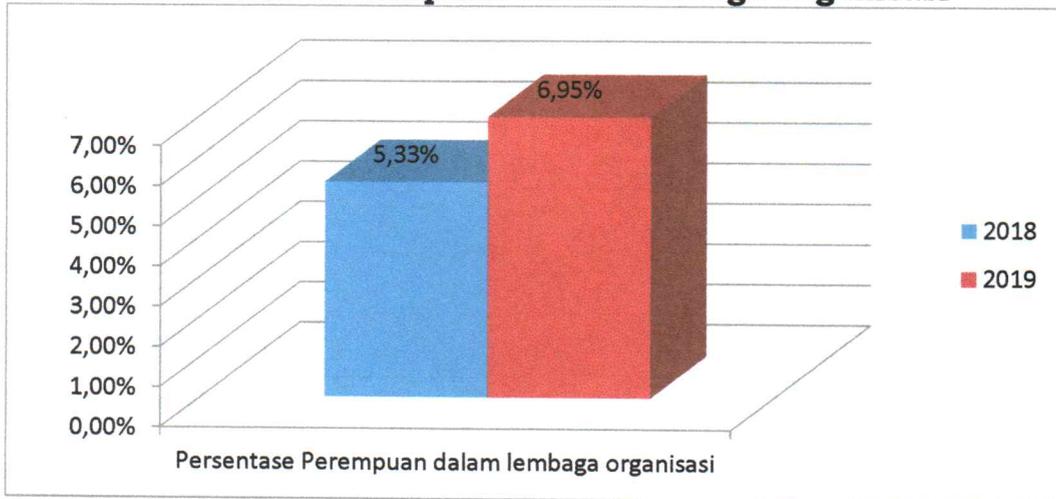
**Grafik 3.2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2018-2019  
Persentase Penanganan Kasus Korban Tindak Kekerasan  
Terhadap Perempuan**





Persentase Penanganan Kasus tindak kekerasan terhadap perempuan pada tahun 2019 dapat ditangani keseluruhan sesuai dengan target yang telah ditentukan sebelumnya.

**Grafik 3.3. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2018-2019  
Persentase Perempuan dalam lembaga Organisasi**



Sesuai dengan yang tercantum pada target pencapaian indikator, untuk persentase perempuan dalam lembaga organisasi tahun 2018 memiliki target pencapaian sebesar 5,33% dan pada tahun 2019 memiliki target pencapaian sebesar 6,95%. Apabila melihat dari grafik 3.3. maka dapat dipastikan pencapaiannya sesuai dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya.

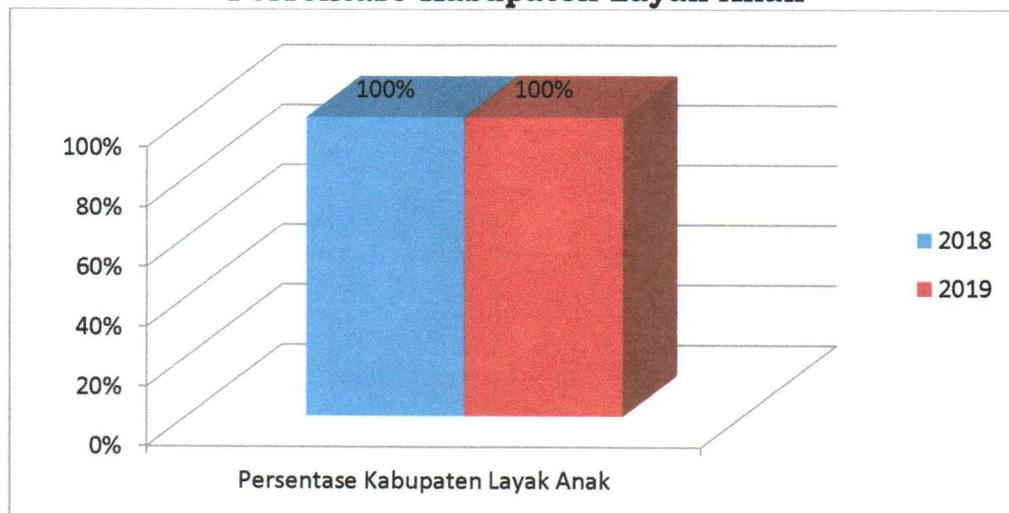
**Grafik 3.4. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2018-2019  
Persentase Penanganan Kasus Korban Tindak Kekerasan terhadap Anak**





Persentase Penanganan Kasus Korban Tindak Kekerasan Terhadap Anak pada tahun 2018-2019 dapat ditangani 100% sesuai dengan target yang telah ditentukan sebelumnya.

**Grafik 3.5. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2018-2019  
Persentase Kabupaten Layak Anak**



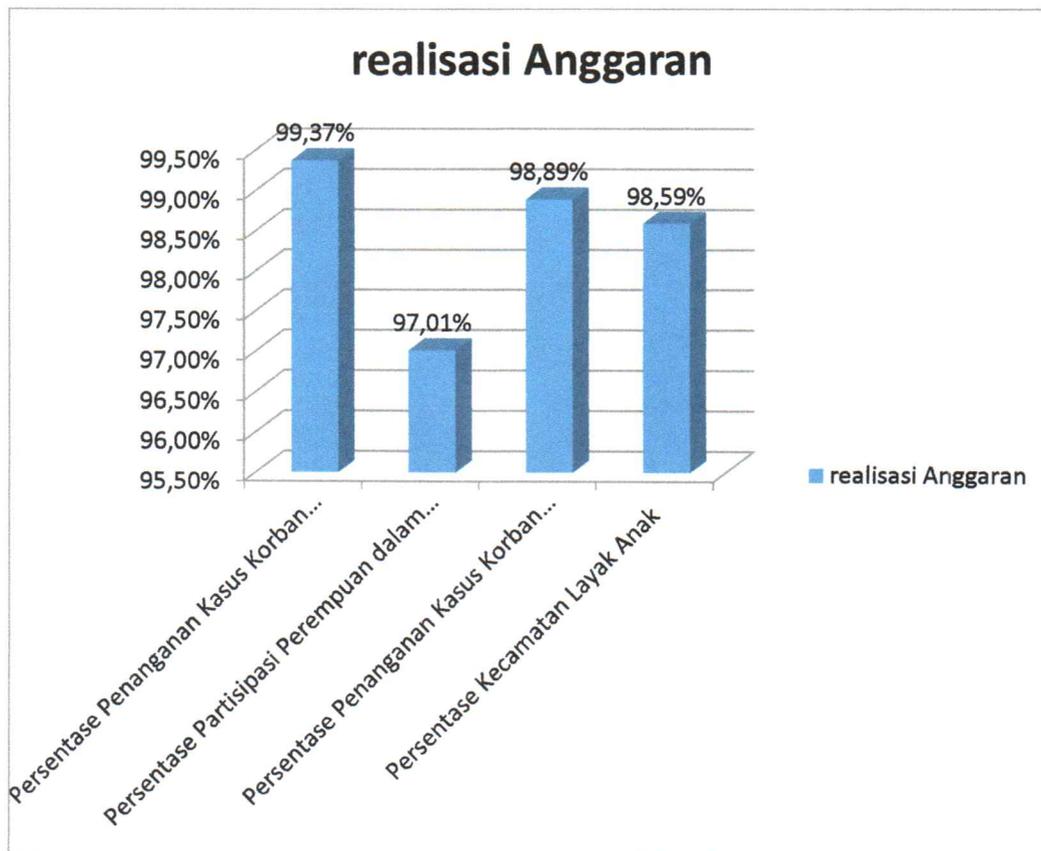
Pada grafik 3.4. dapat dilihat untuk pencapai target tahun 2018 dan 2019 mencapai 100%

**Tabel 3.2. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
			(4)	(4)	(4)
1	Meningkatnya Partisipasi, Pemberdayaan Perempuan dan Pengembangan Hak - hak Anak	Persentase Penanganan Kasus Korban Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan	99,37%	244.166.000	Tinggi
		Persentase Partisipasi Perempuan dalam kelembagaan	97,01%	2.146.458.650	Tinggi
		Persentase Penanganan Kasus Korban Tindak Kekerasan Terhadap Anak	98,89%	1.255.871.838	Tinggi
		Persentase Kecamatan Layak Anak	98,59%	492.960.000	Tinggi



**Grafik 3.6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**



Berdasarkan Grafik 3.6. dapat dilihat bahwa serapan anggaran dari setiap indikator sangat tinggi maka dapat disimpulkan bahwa tingkat efisiensinya sangat tinggi.

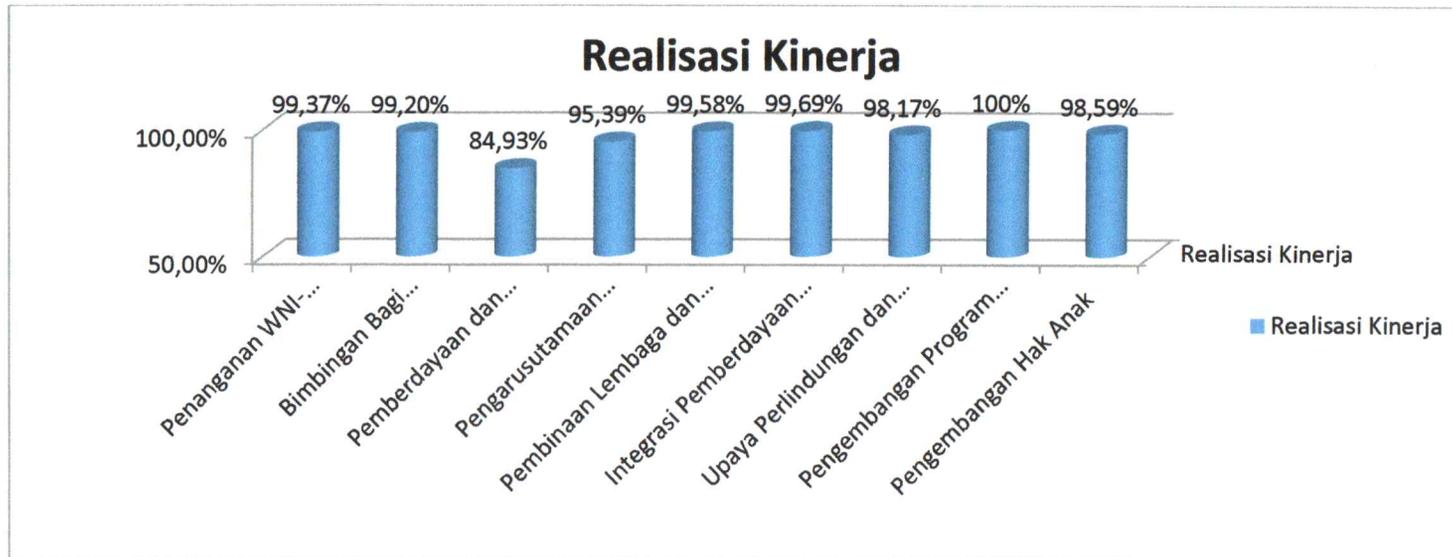


**Tabel 3.3. Analisis Program / Kegiatan yang menunjang keberhasilan  
ataupun kegagalan pencapaian kinerja**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Capaian	Program	Kegiatan
1	Meningkatnya Partisipasi, Pemberdayaan Perempuan dan Pengembangan Hak hak Anak	Persentase Penanganan Kasus Korban tindak Kekerasan Terhadap Perempuan	99,37%	Program Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Perempuan	Penanganan WNI-Migran, Korban Perdagangan Orang dan Korban Tindak Kekerasan
		Persentase Partisipasi Perempuan dalam Kelembagaan	99,20%	Program Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Perempuan	Bimbingan Bagi Kelompok Binaan Sosial Perempuan Kepala Keluarga
			84,93%		Pemberdayaan dan Pembinaan Perempuan
			95,39%		Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Perencanaan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG)
			99,58%		Pembinaan Lembaga dan Organisasi Perempuan
			99,69%		Integrasi Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (Bantuan Provinsi Tahun 2019).
		Persentase Penanganan Kasus Korban tindak Kekerasan Terhadap Anak	98,17%	Program Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Perempuan	Upaya Perlindungan dan Penanganan Korban Kejahatan Seksual Terhadap Perempuan dan Anak
			100%		Pengembangan Program Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)
		Persentase Kecamatan Layak Anak	98,59%	Program Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Perempuan	Pengembangan Hak Anak



**Grafik 3.7. Analisis Program / Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja**



Apabila melihat tabel 3.3. dan grafik 3.7 dapat terlihat bahwa terdapat beberapa kegiatan yang menunjang keberhasilan dari pencapaian target yang telah ditentukan. Untuk Persentase Penanganan Kasus Korban Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan terdapat 1 kegiatan, untuk Persentase Partisipasi Perempuan dalam kelembagaan terdapat 5 kegiatan yang mendukung, untuk Persentase penanganan kasus tindak kekerasan terhadap anak terdapat 2 kegiatan pendukung dan untuk Persentase kecamatan layak anak terdapat 1 kegiatan yang mendukung.



### 3.2. Realisasi Anggaran

**Tabel 3.4. Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2019**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Anggaran	Realisasi	% Capaian Kinerja
			(4)	(4)	(4)
1	Meningkatnya Partisipasi, Pemberdayaan Perempuan dan Pengembangan Hak - hak Anak	Persentase Penanganan Kasus Korban Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan	245.716.000	244.166.000	99,37%
		Persentase Partisipasi Perempuan dalam kelembagaan	2.212.639.000	2.146.458.650	97,01%
		Persentase Penanganan Kasus Korban Tindak Kekerasan Terhadap Anak	1.270.000.000	1.255.871.838	98,89%
		Persentase Kecamatan Layak Anak	500.000.000	492.960.000	98,59%

Di Tahun 2019, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukabumi telah melaksanakan beberapa kegiatan prioritas yang diharapkan dapat membantu tercapainya sasaran strategis yaitu peningkatan partisipasi, pemberdayaan perempuan dan pengembangan hak-hak anak.

Untuk indikator Persentase Penanganan Kasus Korban Tindak kekerasan Terhadap Perempuan, terdapat 1 kegiatan yang mendukung sasaran strategis dengan anggaran Rp. 245.716.000,00 dan di akhir tahun realisasi yang tercapai sebesar 99,37% atau sebesar Rp. 244.166.000,00.

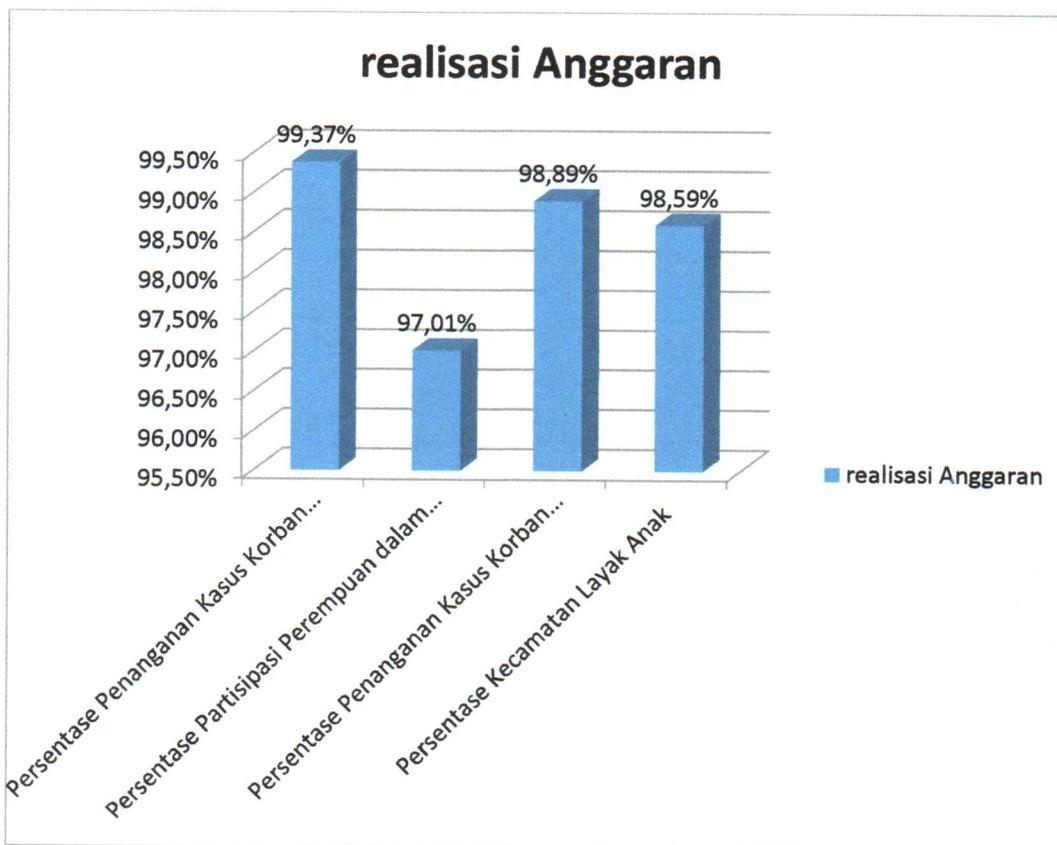


Untuk indikator Persentase Partisipasi Perempuan dalam Kelembagaan, terdapat 5 kegiatan yang mendukung sasaran strategis dengan anggaran Rp. 2.212.639.000,00 dan di akhir tahun realisasi yang tercapai sebesar 97,01% atau sebesar Rp. 2.146.458.650,00.

Untuk indikator Persentase Penanganan Kasus Tindak Kekerasan Terhadap Anak, terdapat 2 kegiatan yang mendukung sasaran strategis dengan anggaran Rp. 1.270.000.000,00 dan di akhir tahun realisasi yang tercapai sebesar 98,89% atau sebesar Rp. 1.255.871.838,00.

Untuk indikator Persentase Kecamatan Layak Anak, terdapat 1 kegiatan yang mendukung sasaran strategis dengan anggaran Rp.500.000.000,00 dan diakhir tahun realisasi yang tercapai adalah 98,59% atau sebesar Rp. 492.960.000,00

**Grafik 3.8. Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2019**





## **BAB IV PENUTUP**

### **4.1. Kesimpulan**

Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukabumi Tahun 2019 merupakan bentuk pertanggungjawaban dari serangkaian rencana kerja, sampai dengan pengukuran kinerja dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kabupaten Sukabumi Tahun 2016 – 2021.

Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukabumi terdapat 4 (empat) Indikator Kinerja Utama (IKU), yang terdiri dari :

1. Pencapaian target sasaran untuk indikator kinerja “Persentase Penanganan Kasus Korban Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan” sebesar 100% dengan kategori **tinggi**.
2. Pencapaian target sasaran untuk indikator kinerja “Persentase Partisipasi Perempuan dalam Kelembagaan” sebesar 100% dengan kategori **tinggi**.
3. Pencapaian Target sasaran untuk indikator kinerja “Persentase Penanganan Kasus Korban Tindak Kekerasan Terhadap Anak” sebesar 100% dengan kategori **tinggi**.
4. Pencapaian Target sasaran untuk indikator kinerja “Kecamatan Layak Anak” sebesar 100% dengan kategori **tinggi**.

Dari data hasil pengukuran kinerja dan realisasi penggunaan anggaran dapat disimpulkan bahwa peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukabumi telah berjalan satu tahun dengan cukup efektif dan efisien. capaian indikator kinerja memberikan kontribusi terhadap



Meningkatnya Partisipasi, pemberdayaan perempuan dan pengembangan hak anak serta meningkatkan Kualitas Hidup Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Sukabumi.

### **Kendala dan Hambatan Dalam Pencapaian Kinerja.**

Pada Tahun Anggaran 2019, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berusaha seoptimal mungkin dalam mencapai sasaran-sasaran kinerja yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2019, dimana hal tersebut merupakan tanggung jawab Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukabumi dalam upaya mencapai indikator sasaran guna menunjang terwujudnya visi dan misi kabupaten sukabumi.

Namun dalam pelaksanaan tanggung jawab tersebut masih terdapat kendala dan hambatan antara lain :

1. Sumber Daya Aparatur yang masih perlu ditingkatkan baik dari sisi kualitas maupun kuantitas;
2. Kualitas pendataan dan penanganan korban tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak masih perlu ditingkatkan kembali

### **Strategi Pemecahan Masalah**

1. Meningkatkan dan mengembangkan kualitas sumber daya aparatur yang terdapat di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukabumi
2. Memberikan kemudahan bagi aparatur pemerintah untuk meningkatkan profesionalismenya melalui pendidikan kedinasan maupun diluar kedinasan;



3. Meningkatkan Kualitas pendataan dan penanganan korban tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak untuk mendukung kualitas dalam penanganan kasus tindak kekerasan.

#### **4.2. Rencana Tindak Lanjut**

Upaya yang akan ditempuh di masa yang akan datang dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran yang optimal yaitu:

1. Diperlukan terobosan baru agar pelaksanaan program kerja dan anggaran menjadi lebih efektif berupa perubahan mekanisme penyusunan program kerja/anggaran dari pola “top down” menjadi “bottom up” sehingga mencerminkan kebutuhan organisasi.
2. Agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilaksanakan secara optimal sesuai dengan target indikator kinerja yang telah ditetapkan, maka optimalisasi mekanisme manajemen internal organisasi di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukabumi akan ditingkatkan, secara pro aktif memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan berbagai kegiatan yang dilaksanakan.
3. Upaya koordinasi dan peningkatan kerjasama dengan berbagai instansi terkait baik di pusat, provinsi maupun daerah akan dilakukan dengan lebih intensif, mengingat berbagai pencapaian target indikator yang telah ditetapkan hanya dapat dilakukan dengan melibatkan segenap instansi pemerintah pusat dan daerah, masyarakat, dunia usaha dan *civil society*.



**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
KABUPATEN SUKABUMI**

Demikian Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukabumi Tahun 2019, semoga dapat bermanfaat dan dijadikan bahan dalam rangka meningkatkan kinerja serta penyempurnaan pelayanan pada seluruh aparatur dan masyarakat Kabupaten Sukabumi.

Sukabumi, 31 Desember 2019

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan  
Dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukabumi,



**H. AISAH, SE., Ak., M.Sc.**

NIP. 196602131990032005

# LAMPIRAN

**CASCADING**  
**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN SUKABUMI**  
**TAHUN ANGGARAN 2019**

No	Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Indikator Kinerja Sasaran	Program	Indikator Kinerja Program	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
1	2	3	5	6	7	8	9
1	Meningkatkan Perlindungan Terhadap anak dan Perempuan	Peningkatan Partisipasi Pemberdayaan Perempuan dan Pengembangan Hak hak Anak	Persentase Penanganan Kasus Korban Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan	Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Perempuan	Pencegahan dan Penanggulangan Korban Perdagangan Orang dan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan	<p>Penanganan WNI-Migran, Korban Perdagangan Orang dan Korban Tindak Kekerasan</p> <p>Pembuatan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peserta Sosialisasi Penanganan WNI Migran, KPO dan KTK di Kecamatan Cicantayan</li> <li>- Peserta Sosialisasi Penanganan WNI Migran, KPO dan KTK di Kecamatan Cidahu</li> <li>- Peserta Sosialisasi Penanganan WNI Migran, KPO dan KTK di Kecamatan Simpenan</li> <li>- Peserta Sosialisasi Penanganan WNI Migran, KPO dan KTK di Kecamatan Jampang Tengah</li> <li>- Peserta Sosialisasi Penanganan WNI Migran, KPO dan KTK di Kecamatan Jampang Kulon</li> <li>- Sosialisasi Advokasi Perlindungan dan Pemberdayaan Hak Perempuan</li> <li>- Peserta Penyusunan dan Pembahasan draft perda Pemberdayaan dan perlindungan perempuan di Kab.Sukabumi</li> <li>- Peserta Pertemuan Lintas sektor Tk. Kabupaten dalam rangka Penyusunan draft perda tentang Pemberdayaan dan perlindungan perempuan di Kab.Sukabumi</li> <li>- Peserta Rakor, Diseminasi dalam rangka Perda Pemberdayaan dan perlindungan perempuan di Kab.Sukabumi</li> <li>- Peserta Kunjungan kerja ke kota medan sumatra utara</li> <li>- Jumlah Peserta Bimtek Peningkatan KApasitas Kelompok PEKKA</li> </ul>
			Persentase Partisipasi	Pemberdayaan, Perlindungan	Partisipasi Perempuan di	Bimbingan Bagi Kelompok Binaan Sosial Perempuan	

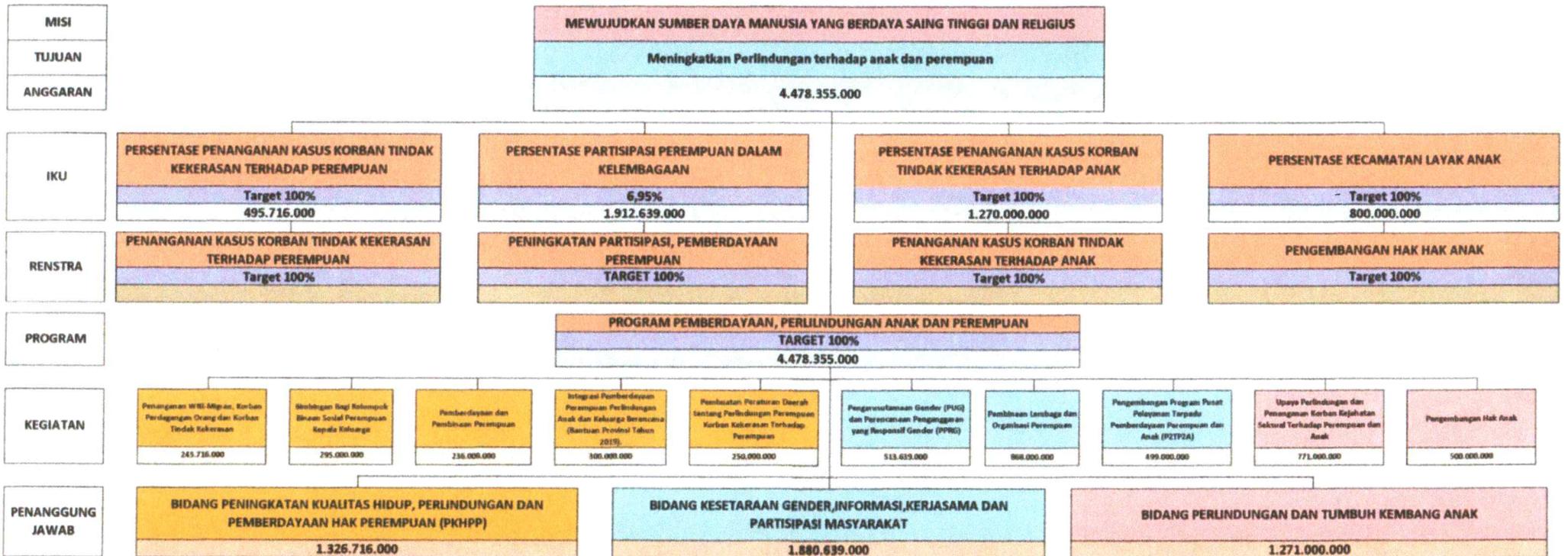
No	Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Indikator Kinerja Sasaran	Program	Indikator Kinerja Program	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
1	2	3	5	6	7	8	9
			Perempuan dalam lembaga dan Organisasi Perempuan	Anak dan Perempuan	Berbagai Lembaga Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	<p>Kepala Keluarga</p> <p>Pemberdayaan dan Pembinaan Perempuan</p> <p>Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Perencanaan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah Peserta Pelatihan Pengolahan dan Pengemasan Hasil Produksi Kelompok PEKKA</li> <li>- Honorarium Pendamping PL PEKKA</li> <li>- Jumlah Peserta Lomba Kreatifitas Olahan Makanan Berbahan Lokal</li> <li>- Jumlah Peserta Lomba Menghias Kue Tart</li> <li>- Jumlah Peserta Pelatihan Keterampilan Merangkai Kalung Clay</li> <li>- Jumlah Peserta Pelatihan Keterampilan Menjahit dan Menyulam</li> <li>- Jumlah Peserta Rakor Pembentukan PEKKA</li> <li>- Bimtek Pengolahan Makanan Tradisional</li> <li>- Peserta Rakor P2WKSS Tingkat Kabupaten</li> <li>- Peserta Rakor P2WKSS Tingkat Kecamatan</li> <li>- Peserta Verifikasi P2WKSS Tingkat Provinsi</li> <li>- Peserta Evaluasi P2WKSS Tingkat Kabupaten</li> <li>- Peserta Evaluasi P2WKSS Tingkat Provinsi</li> <li>- Pengadaan Bahan Bangunan</li> <li>- Re Cheking P2WKSS Tingkat Provinsi</li> <li>- Pelatihan GAP dan GBS untuk Lembaga Masyarakat, Perguruan Tinggi dan Dunia Usaha</li> <li>- Penyusunan Draft Perda Tentang Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Sukabumi</li> <li>- Pertemuan Lintas Sektor Tk. Kabupaten Sukabumi dalam rangka Penyusunan Draft Perda Tentang Pengarusutamaan Gender</li> <li>- Advokasi mengenai draft dalam rangka penyusunan draft perda tentang Pengarusutamaan gender di kabupaten sukabumi</li> <li>- Pembahasan mengenai draft dalam rangka</li> </ul>

No	Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Indikator Kinerja Sasaran	Program	Indikator Kinerja Program	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
1	2	3	5	6	7	8	9
						Pembinaan Lembaga dan Organisasi Perempuan	<p>penyusunan draft perda tentang pengarusutamaan gender di kabupaten sukabumi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pertemuan Persiapan Kunjungan Kerja dalam rangka Penyusunan draft Perda tentang Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Sukabumi ke Kabupaten Kebumen Prov. Jawa</li> <li>- Sosialisasi Diseminasi dalam rangka Perda Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Sukabumi</li> <li>- Peserta kegiatan pelatihan seminar perangkat desa menindaklanjuti korban kekerasan</li> <li>- Peserta kegiatan Peringatan Hari Ibu (GOW)</li> <li>- Peserta kegiatan pencegahan narkoba dan pornografi (GOW)</li> <li>- Peserta kegiatan workshop peran serta perempuan dalam bidang politik pada pemilu 2019</li> <li>- Peserta kegiatan sosialisasi remaja pendamping kekerasan</li> <li>- Peserta kegiatan pelatihan lomba berbasis pantun SMP (DWP)</li> <li>- Peserta kegiatan pelatihan sosialisasi kesehatan reproduksi bagi remaja (DWP)</li> <li>- Peserta Kegiatan donor darah (DWP)</li> <li>- Peserta kegiatan sosialisasi penyakit meningitis/eukimia (DWP)</li> <li>- peserta kegiatan sosialisasi HIV/AIDS (DWP)</li> <li>- peserta kegiatan pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, peredaran gelap narkoba (P4GN) DWP</li> <li>- peserta kegiatan pelatihan pembuatan kerudung syari (DWP)</li> <li>- peserta kegiatan analisa profil gender 2018</li> </ul>

No	Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Indikator Kinerja Sasaran	Program	Indikator Kinerja Program	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
1	2	3	5	6	7	8	9
			Persentase Penanganan Kasus Korban Tindak Kekerasan Terhadap Anak	Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Perempuan		<p>Upaya Perlindungan dan Penanganan Korban Kejahatan Seksual Terhadap Perempuan dan Anak</p> <p>Pengembangan Program Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- peserta kegiatan Diseminasi pendataan profil gender 2018</li> <li>- peserta kegiatan pembukuan profil gender 2018</li> <li>- peserta kegiatan kerjasama dengan Akademis</li> <li>- Peserta kegiatan Rakoor Desa (PUG)</li> <li>- peserta kegiatan kerjasama dengan Rumah Sakit</li> <li>- peserta kegiatan kerjasama dengan pihak swasta</li> <li>- peserta kegiatan kerjasama dengan lembaga masyarakat</li> <li>- Peserta kegiatan bimbingan politik bagi perempuan (KPPI)</li> <li>- Peserta Sosialisasi Pembentukan SATGAS PA dan Pos Rindu Asi</li> <li>- Peserta Diseminasi Pencegahan dan Penanganan Kejahatan/Kekerasan Terhadap anak</li> <li>- Peserta Sosialisasi Peraturan Daerah tentang pengasuhan anak dalam keluarga</li> <li>- Peserta Pelatihan Sistem Perlindungan Anak (SPA)</li> <li>- Peserta Pelatihan Perlindungan Anak Berbasis Masyarakat PPABM</li> <li>- Peserta Kapasiti Building SATGAS PA</li> <li>- Peserta Pelatihan Parenting Skil</li> <li>- Penanganan Kasus</li> <li>- Peserta Capacity building pengurus P2TP2A</li> <li>- Peserta Workshop penanganan kasus kekerasan</li> <li>- Peserta Sosialisasi peraturan perundang undangan tentang perlindungan anak dan perempuan bagi masyarakat</li> <li>- Peserta Rekonsiliasi data kekerasan</li> </ul>

No	Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Indikator Kinerja Sasaran	Program	Indikator Kinerja Program	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
1	2	3	5	6	7	8	9
			Persentase Kecamatan Layak Anak	Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Perempuan		<p>Pengembangan Hak Anak</p> <p>Integrasi Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (Bantuan Provinsi Tahun 2019)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peserta Evaluasi Tim Gugus Tugas KLA</li> <li>- Peserta Penjelasan Input Indikator KLA</li> <li>- Peserta Pertemuan FAD TK. Kabupaten sukabumi</li> <li>- Peserta Bintek KHA bagi Guru BK pada SMRA</li> <li>- Peserta Diseminasi Pengembangan S/MRA</li> <li>- Peserta Diseminasi Model Pondok Pesantren Ramah Anak</li> <li>- Peserta Sosialisasi KLA (Kec. Bojonggenteng dan Kec. Gunungguruh)</li> <li>- Peserta Sosialisasi Tumbuh kembang Anak (kec. Bojonggenteng)</li> <li>- Peserta Verifikasi KLA oleh Tim Pusat</li> <li>- Hari Anak Nasional</li> <li>- Peserta Pembentukan Kampung Ramah Anak</li> <li>- Peserta Pembentukan Kapung KB</li> <li>- Kelompok Pekka Sekoper Cinta</li> <li>- Peserta Pembinaan Program Sekoper Cinta</li> </ul>

**POHON KINERJA  
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
KABUPATEN SUKABUMI  
TAHUN 2019**

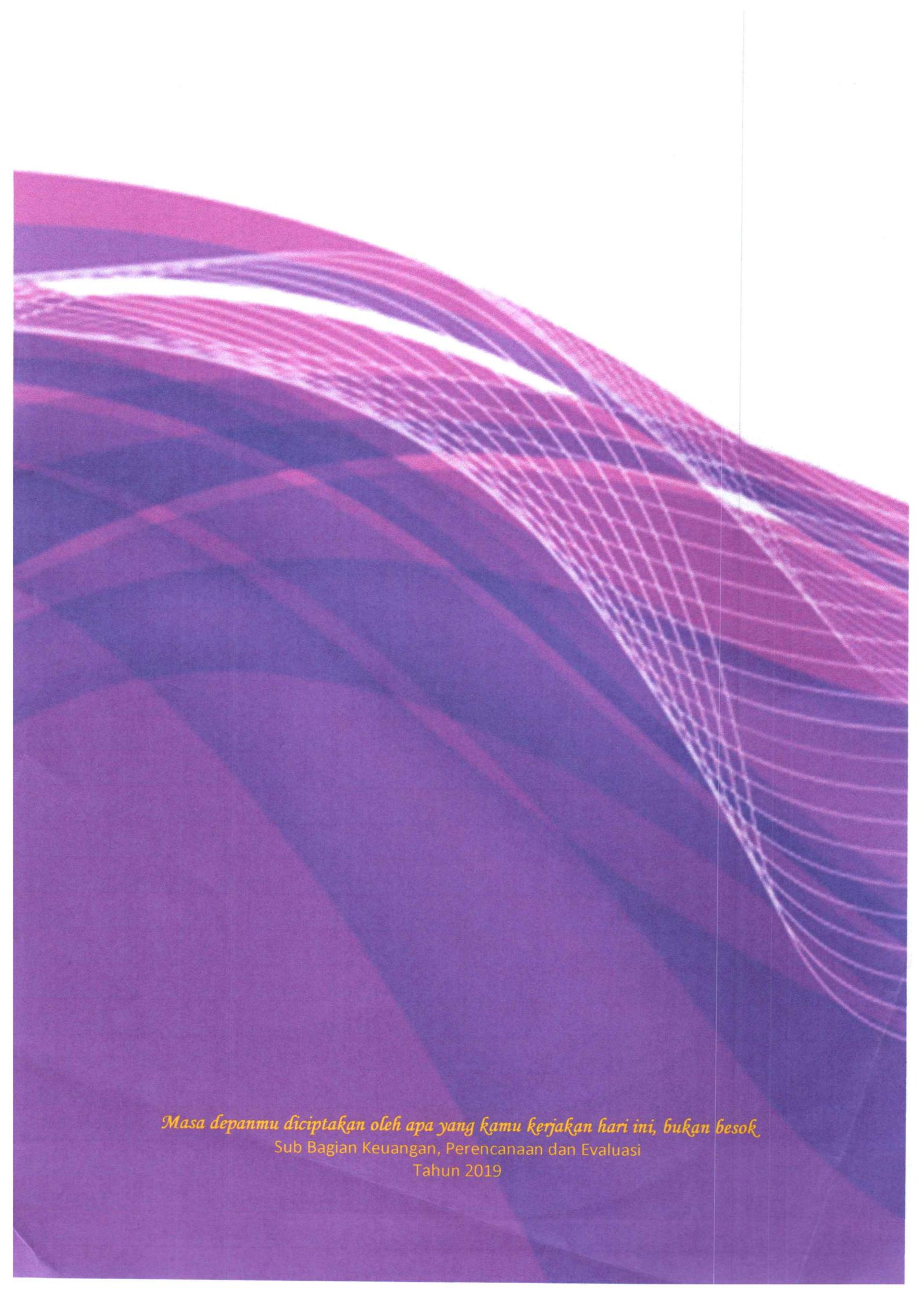












*Masa depanmu diciptakan oleh apa yang kamu kerjakan hari ini, bukan besok.*  
Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi  
Tahun 2019